

POLICY BRIEF

Sekolah Rakyat: Menjawab Tantangan, Mewujudkan Harapan

Ditujukan kepada:

Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kemenaker, LAN RI, Pemerintah Daerah

Disusun Oleh:

Ricky Noor Permadi, Maria Agustini Permata Sari,
T. Miftahul Heldra Sandiza. TH, Dewi Sartika

EXECUTIVE SUMMARY

Sekolah Rakyat merupakan terobosan strategis untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu, yang telah mendapatkan minat dari sekitar 300 daerah. Namun, pengembangannya menghadapi tantangan sistemik, seperti pengunduran diri peserta didik akibat pola pikir negatif, keterlibatan orang tua, ketersediaan dan kompetensi guru, kurikulum yang belum kontekstual, serta minimnya kolaborasi multipihak. Untuk itu, diperlukan strategi terpadu berupa strategis utama dan strategi penunjang. Strategi Utama difokuskan pada penguatan aspek internal Sekolah Rakyat, yakni peserta didik, guru/tenaga pendidik, serta kurikulum. Adapun Strategi Penunjang diarahkan pada penguatan kolaborasi multipihak.

PENDAHULUAN

Program Sekolah Rakyat saat ini mulai mendapatkan respon positif sebagai salah satu terobosan dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang selama ini sulit menjangkau layanan pendidikan formal (IDN Times, 2025). Inisiatif sekolah rakyat diharapkan mampu menarik partisipasi lebih luas, menghadirkan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta menjadi simbol komitmen negara dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif. Bahkan sekitar 300 daerah (provinsi/kabupaten/kota) telah mengajukan minat agar Sekolah Rakyat juga didirikan di wilayah mereka (timesindonesia. 2025)

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem memberikan landasan strategis bagi pengembangan program-program berbasis inklusi sosial, termasuk Sekolah Rakyat. Meskipun demikian, agar visi besar Sekolah Rakyat benar-benar dapat terwujud, diperlukan perhatian serius pada berbagai aspek penyelenggaraan dan pengembangannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa capaian awal yang sudah ditunjukkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berkembang menjadi model pendidikan alternatif yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.



Gambar 1. Jumlah Siswa, Guru dan Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan hasil literatur review terhadap berita di media, jurnal, serta laporan yang terkait dengan Sekolah Rakyat di beberapa daerah, terdapat informasi mengenai faktor yang menjadi tantangan. Tantangan ini bersifat sistemik dan multidimensial, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah, diantaranya peserta didik, guru, serta keterlibatan *stakeholder*.

Aspek pertama yang menjadi tantangan adalah Peserta Didik. Tantangan utama pada aspek ini adalah masih terdapatnya peserta didik yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat mengundurkan diri (kompas.com, 2025). Meskipun angkanya tidak terlalu banyak (1,4 persen dari total peserta didik), namun hal ini tentu tetap perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya hal yang serupa ketika Sekolah Rakyat lainnya dibuka.

Salah satu penyebab pengunduran diri peserta didik tersebut dikarenakan pola pikir peserta didik (schoolmedia.id, 2025). Sebagian besar calon peserta Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin, yatim piatu, atau kelompok rentan. Mereka bisa membawa pola pikir yang sudah terbentuk oleh pengalaman hidup penuh keterbatasan: rasa minder, pesimis, bahkan trauma. Hal ini mempengaruhi motivasi belajar dan kesiapan beradaptasi dengan sistem asrama yang disiplin (schoolmedia.id, 2025). Karena kurikulum Sekolah Rakyat bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi pola pikir. Seperti dari mentalitas kekurangan menuju mentalitas percaya diri dan berdaya. Jika transformasi pola pikir gagal, maka *output* Sekolah Rakyat (anak-anak yang mandiri, berkarakter, dan siap bersaing) tidak akan tercapai, meskipun fasilitas dan kurikulum sudah lengkap.

Disamping Peserta Didik, Orang Tua/ Wali menjadi aspek kedua yang menjadi tantangan bagi program Sekolah Rakyat. Keterlibatan orang tua dalam ekosistem Sekolah Rakyat masih menghadapi sejumlah hambatan. Di banyak keluarga sasaran (yang kerap berada pada kondisi sosial-ekonomi rentan) terdapat orientasi jangka pendek terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga partisipasi anak dalam kegiatan sekolah/asrama dipandang "mengurangi" kontribusi kerja anak di rumah. Selain itu, sebagian orang tua masih memiliki persepsi yang keliru tentang konsep asrama, misalnya kekhawatiran kehilangan kendali pengasuhan, isu keamanan, atau anggapan bahwa "sekolah gratis" identik dengan kualitas rendah.

Dampaknya, motivasi dan retensi siswa lebih rapuh, kepatuhan terhadap tata tertib asrama lebih mudah goyah, serta capaian akademik dan pembentukan karakter berjalan tidak optimal karena “lingkar dukungan” di rumah tidak sejalan dengan intervensi di sekolah. Tanpa penguatan kemitraan dengan orang tua, kontrak belajar tripartit (sekolah–orang tua–siswa) Sekolah Rakyat berisiko menghadapi tingkat ketidakhadiran, pengunduran diri dan kegagalan adaptasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi pola pikir dan karakter siswa (yang menjadi ruh Sekolah Rakyat) sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi dan komitmen orang tua sebagai mitra pengasuhan.

Guru, merupakan aspek ketiga yang menjadi tantangan berikutnya. Sebanyak 9,7 persen guru PPPK yang lulus seleksi tidak memenuhi panggilan sebagai guru Sekolah Rakyat. Mereka beralasan domisili mereka terlalu jauh dengan penempatan Sekolah Rakyat (kompas.com, 2025).

Selain itu, kapasitas guru dan tenaga pendidik juga menjadi tantangan tersendiri. Konsep Sekolah Rakyat yang menggabungkan antara pendidikan formal dan asrama, membutuhkan guru dan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi mengajar, dengan kurikulum yang lebih kompleks, yakni gabungan antara akademik, karakter, serta teknologi. Kurikulum Sekolah Rakyat juga bersifat fleksibel, dengan sistem multi-entry, multi exit, yang memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan studi berdasarkan latar belakang pendidikan mereka (Kementerian Sekretariat Negara, 2025). Dengan kondisi dan karakter murid yang beragam guru dan tenaga pendidik tentu dituntut untuk memiliki kompetensi mengelola dinamika kelas yang peserta didiknya heterogen.

Kurikulum menjadi aspek keempat yang menjadi tantangan Sekolah Rakyat. Diperlukan penyesuaian kurikulum nasional, muatan lokal, dan penguatan karakter peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam ibadah, belajar dan beraktivitas sehari-hari (LAN, 2025).

Kurikulum tidak hanya harus memastikan terpenuhinya standar kompetensi nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kearifan lokal, kebutuhan masyarakat sekitar, serta menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Tanpa desain kurikulum yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter, Sekolah Rakyat berisiko hanya menjadi sekolah alternatif biasa tanpa daya beda yang signifikan dalam memutus rantai kemiskinan (LAN, 2025). Oleh karena itu, kurikulum Sekolah Rakyat harus benar-benar dirancang sebagai kurikulum holistik yang mengintegrasikan dimensi akademik, keterampilan hidup, nilai-nilai kebangsaan, serta penguatan iman dan moral, sehingga mampu melahirkan generasi yang unggul, mandiri, dan berdaya saing (LAN, 2025).

Aspek kelima yang menjadi tantangan sekolah rakyat adalah kolaborasi antara orang tua, masyarakat, swasta, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat dukungan pendanaan, inovasi kurikulum, penyediaan tenaga ahli, serta pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga memperkuat keberlanjutan Sekolah Rakyat.

Namun, dalam praktiknya kolaborasi tersebut masih sangat minim (LAN, 2025). Sering muncul kendala seperti perbedaan prioritas antar pihak, kapasitas pemerintah daerah yang tidak merata, keterbatasan komitmen swasta dalam investasi sosial jangka panjang, serta keterlibatan masyarakat yang masih rendah. Perguruan tinggi pun kerap terlibat secara sporadis dan berbasis proyek, sehingga tidak berkelanjutan. Tanpa sinergi yang kuat dan konsisten, Sekolah Rakyat berisiko berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem pendidikan yang lengkap, padahal keberhasilannya justru sangat ditentukan oleh partisipasi dan komitmen semua pemangku kepentingan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Program Sekolah Rakyat membutuhkan strategi yang terarah agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai. Untuk itu diperlukan beberapa strategi yang tepat serta dukungan kebijakan yang memadai, di antaranya adalah:

Membuat Pemetaan Alasan Peserta Didik Mengundurkan Diri

Hal ini agar langkah yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, misalkan dengan mengganti peserta didik yang mengundurkan diri dengan peserta didik lainnya, namun juga bersifat preventif, yakni dengan mendeteksi risiko sejak dini. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui wawancara (peserta didik/keluarga peserta didik), angket, serta observasi guru untuk mengidentifikasi faktor utama yang mendorong siswa mundur, baik karena masalah ekonomi, psikologis, sosial-keluarga, maupun akademik.

Untuk menekan angka pengunduran diri peserta Sekolah Rakyat, perlu diberikan informasi yang jelas mengenai langkah lanjutan setelah lulus jenjang SMA. Peserta Sekolah Rakyat dapat melanjutkan ke perguruan tinggi (universitas, politeknik, maupun sekolah vokasi) dengan dukungan Kementerian Sosial yang akan memfasilitasi melalui pendampingan pendaftaran, program beasiswa, atau jalur *bridging*.

Mengintegrasikan Masa Orientasi Dengan *Fun Learning*

Masa orientasi sering kali hanya berfokus pada pengenalan aturan sekolah, guru, dan fasilitas. Jika digabung dengan *fun learning*, orientasi tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga sarana pemulihan psikologis, penguatan rasa percaya diri, dan membangun ikatan sosial antar siswa. Untuk mendukung tujuan tersebut, sesi orientasi dapat menghadirkan narasumber inspiratif, seperti tokoh masyarakat atau pengusaha sukses, yang mampu berbagi pengalaman dan menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta Sekolah Rakyat.

Menyiapkan Kurikulum yang Kontekstual

Strategi ini dilakukan dengan menyusun kurikulum fleksibel yang menyeimbangkan 50% literasi dasar dengan 50% keterampilan ekonomi lokal. Literasi dasar meliputi kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta literasi digital yang menjadi fondasi untuk keberhasilan belajar di jenjang berikutnya. Sementara itu, keterampilan ekonomi lokal berfokus pada penguasaan keahlian praktis yang relevan dengan potensi wilayah, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, atau kewirausahaan kecil, sehingga sejak dini peserta didik dapat menumbuhkan kemandirian dan jiwa produktif.

Dengan model ini, kurikulum tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemberdayaan keterampilan yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini sekaligus menjadikan Sekolah Rakyat lebih adaptif, relevan, dan berdaya guna bagi siswa maupun lingkungannya.

Metode Belajar: *Project-Based Learning*

Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terlibat langsung dalam merancang dan melaksanakan proyek nyata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Proyek tersebut dapat berupa kegiatan berbasis potensi lokal, seperti membuat produk kerajinan, mengelola kebun sekolah, atau merancang usaha kecil yang sederhana. Dengan demikian, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna karena menghubungkan teori dengan praktik, sekaligus menumbuhkan keterampilan kolaborasi, kreativitas, pemecahan masalah, serta jiwa kewirausahaan.

Optimalisasi CSR untuk Mendukung Sekolah Rakyat

Selain dukungan pemerintah dan masyarakat, keberlanjutan Sekolah Rakyat juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari dunia usaha. Program CSR umumnya diarahkan pada pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga sangat relevan untuk mendukung penguatan Sekolah Rakyat. Ada beberapa bentuk kontribusi CSR yang dapat dioptimalkan, antara lain: dukungan infrastruktur dan sarana pembelajaran; program *capacity building* bagi guru dan tenaga pendidik; program magang kerja bagi peserta didik dan lain sebagainya.



Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

Melalui program ini, mahasiswa berkesempatan untuk mengaplikasikan ilmu keguruan secara nyata sekaligus memperkuat kapasitas sekolah dalam hal pendampingan belajar, inovasi metode pembelajaran, serta pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah.

Agar berbeda dari KKN reguler, maka KKN mahasiswa di Sekolah Rakyat diarahkan sebagai *Co-Teacher* dan *Curriculum Innovator*. Mahasiswa tidak hanya hadir untuk mengajar, tetapi menjadi *co-teacher* yang bekerja sama dengan fasilitator lokal. Mereka ikut menyusun, mengadaptasi, dan mengembangkan kurikulum Sekolah Rakyat, sehingga ada inovasi dalam materi maupun metode belajar. Selain itu mahasiswa program KKN Tematik juga harus berdasarkan proyek, dimana setiap mahasiswa atau kelompok diwajibkan merancang mini project yang relevan dengan kebutuhan siswa, misalnya: kelas literasi, pembelajaran berbasis kearifan lokal, teknologi sederhana, atau keterampilan ekonomi keluarga.

Program Sister School

Program ini menghubungkan Sekolah Rakyat dengan sekolah formal maupun perguruan tinggi sebagai mitra strategis. Melalui pola ini, setiap Sekolah Rakyat akan memiliki sekolah “saudara” yang berperan sebagai pendamping, berbagi sumber daya, serta memberikan penguatan kapasitas. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan kurikulum, pelatihan guru atau fasilitator, penyediaan materi pembelajaran, hingga kegiatan mengajar bersama yang memungkinkan terjadinya rotasi guru. Dengan model *sister school*, Sekolah Rakyat tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari jejaring pendidikan yang lebih luas. Hal ini akan memperkuat inklusi pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus memastikan keberlanjutan program melalui kolaborasi yang lebih nyata dan terukur.

Program Prioritas Bagi Lulusan SR Untuk Masuk BLK

Melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), pemerintah daerah dapat memberikan jalur prioritas bagi lulusan Sekolah Rakyat. Kesempatan ini tidak hanya sesuai dengan minat dan potensi siswa, tetapi juga memberi gambaran masa depan yang lebih pasti. Dengan begitu, siswa terdorong untuk menuntaskan pendidikan, sementara Sekolah Rakyat semakin diakui sebagai jalur pendidikan yang mampu membuka peluang mobilitas sosial.

Bantuan atau Insentif bagi Orang Tua Peserta Sekolah Rakyat

Skema ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, khususnya dalam strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrem. Melalui bantuan bersyarat atau *voucher* pendidikan, pemerintah tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan alternatif, tetapi juga memastikan bahwa keluarga kurang mampu tetap memiliki daya dukung ekonomi untuk mempertahankan anaknya di sekolah. Insentif ini sekaligus menjadi bentuk investasi sosial jangka panjang yang memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mempercepat agenda nasional penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pembinaan Kewirausahaan bagi Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat

Melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, serta fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, orang tua peserta Sekolah Rakyat dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di lingkungannya. Alternatif ini dapat diintegrasikan dengan program pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif dan dana desa sehingga memperkuat ekosistem sosial-ekonomi di sekitar Sekolah Rakyat. Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga, keberlanjutan pendidikan anak menjadi lebih terjamin.

Tabel 1. Tantangan dan Strategi Sekolah Rakyat

ASPEK	TANTANGAN	STRATEGI
Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada peserta didik yang mengundurkan diri Pola pikir (minder, pesimis, trauma) 	<ul style="list-style-type: none"> Reposisi dan Branding SR sebagai Sekolah Pembelajar Tangguh Pemetaan penyebab peserta didik mengundurkan diri Mengintegrasikan masa orientasi dengan fun learning
Orang tua	Orang tua butuh bantuan anak dalam mencari rezeki	<ul style="list-style-type: none"> Insentif bagi Orang Tua Pembinaan Kewirausahaan bagi Orang Tua
Guru dan Tenaga Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> Domisili guru yang jauh dari lokasi SR Kompetensi dalam mengelola peserta didik yang heterogen 	<ul style="list-style-type: none"> Sister School Akademi Sekolah Rakyat sebagai Pelatihan bagi Tenaga Pendidik
Kurikulum	Penyesuaian kurikulum yang kontekstual	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan kurikulum kontekstual dengan mengedepankan keterampilan ekonomi lokal Metode belajar: project-based learning
Kolaborasi	Minimnya kolaborasi antara orang tua, masyarakat, swasta, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong CSR sebagai dukungan Sekolah Rakyat Mendorong Perguruan Tinggi melakukan KKN Tematik di Sekolah Rakyat

Sumber: Pusjar SKPP, 2025

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tantangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat membutuhkan strategi yang terarah agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai. Rekomendasi kebijakan dalam policy brief ini dibagi menjadi dua kategori yakni Strategi Utama dan Strategi Penunjang. Strategi Utama difokuskan pada penguatan aspek internal Sekolah Rakyat, yakni peserta didik, guru/tenaga pendidik, serta kurikulum. Adapun Strategi Penunjang diarahkan pada penguatan kolaborasi multipihak.

Dengan pembagian ini, Sekolah Rakyat tidak hanya diperkuat dari dalam, tetapi juga mendapat dukungan dari luar melalui jejaring kolaborasi. Kombinasi strategi utama dan penunjang inilah yang diharapkan dapat memastikan Sekolah Rakyat lebih inklusif, berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Business Ready World Bank, 2024, <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/c41e4fc7-55e5-4a42-8cfe-c1f8d60a734f/content>
- IMD World Competitiveness Yearbook, 2024, https://productivity.gov.ng/wp-content/uploads/2025/03/WCY_Bookletv1_2024-1.pdf
- Jurnal Post, 2025, <https://jurnalpost.com/survei-kemudahan-berusaha-di-daerah-693-pelaku-usaha-suarakan-peluang-dan-hambatan-investasi/85561/>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2025, <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>
- Kementerian Pertanian, 2024, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/investasi-menjadi-pilar-pembangunan-perkebunan-menuju-visi-indonesia-emas-2045/>